

BAB III

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian di lapangan melalui data primer dan sekunder. Data primer tersebut merupakan data yang diperoleh peneliti dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung dengan proses perumusan strategi pemerintah dalam menanggulangi buta aksara di Kabupaten Brebes pada tahun 2015. Seluruh data yang telah terkumpul dari hasil penelitian di lapangan akan dipaparkan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif. Hal tersebut bertujuan agar analisa terhadap seluruh data yang diperoleh dan diklarifikasikan dengan lebih sederhana dan dapat dijelaskan dengan kalimat yang lebih mudah dipahami sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik.

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai analisis lingkungan strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. Analisis lingkungan tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam pembuatan strategi kebijakan yang akan dibuat. Analisis lingkungan dilakukan dengan cara melihat pada lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Pemahaman dalam lingkungan internal bertujuan untuk mengetahui kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakness*), sedangkan lingkungan eksternal digunakan untuk mengetahui peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*). Pemahaman mengenai kedua lingkungan tersebut digunakan sebagai pijakan dalam analisis SWOT (*strenght, weakness, opportunities, threats*) yang bertujuan untuk merumuskan isu strategis ada tahapan analisis berikutnya.

3.1 Analisis Lingkungan Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes

3.1.1 Identifikasi Visi dan Misi

3.1.1.1 Visi

Adapun visi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

“Edukatif, ilmiah, kompetitif, dan religius”

3.1.1.2 Misi

Dalam upaya mencapai tujuan dari Visi tersebut, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan serta menyelenggarakan pendidikan disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya yang berkualitas, berdaya saing global, dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional.

Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes melakukan upaya untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat guna tetap mendapatkan layanan pendidikan yang dibutuhkan dengan ilmu-ilmu yang berkualitas dan tetap selaras dengan tujuan pendidikan nasional agar tercipta masyarakat yang dapat berdaya saing secara global.

- 2) Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan teori dan praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal.

Dalam misi ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes melakukan program dan kegiatan peningkatan SDM bagi para pendidik maupun

tenaga kependidikan dalam bentuk pelatihan atau *softskill* untuk meningkatkan ilmu kependidikan dengan menggunakan metode yang bervariasi agar dapat dengan mudah dipahami dan tetap menunjang tinggi nilai-nilai adat serta kebudayaan di lingkungan sekitar.

- 3) Mewujudkan terselenggaranya proses pembelajaran kreatif, inovatif dan berakhlak mulia.

Misi ini dapat mengembangkan kemampuan belajar masyarakat dalam menciptakan hal-hal baru yang diperoleh baik dari proses pendidikan formal maupun non formal untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak dapat diprediksikan di masa depan.

Berdasarkan pernyataan visi dan misi diatas terkandung pengertian bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes memiliki tugas dan fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi di Bidang Pendidikan. Maka seluruh komponen dan sumberdaya yang ada harus difungsikan sebagai wahana (fasilitas) dalam pembangunan pada bidang pendidikan.

3.1.2 Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*)

3.1.2.1 Lingkungan Internal

Lingkungan internal digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.

(1) *Strenght* (Kekuatan)

Sebuah strategi yang akan dibuat oleh pemerintah, perlu adanya identifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal. Selain itu, pemerintah membutuhkan pertimbangan untuk menetapkan suatu kebijakan yang tepat agar dapat mengatasi suatu masalah dengan solusi yang terbaik. Hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dalam menanggulangi masalah buta aksara yang dari tahun ke tahun dengan menjalankan strategi yang bersumber dari kekuatan internal. Berikut ulasan yang disampaikan oleh Dr. Tahroni, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dalam memaparkan kekuatan internal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, yaitu :

“Menurut hemat saya, dalam menanggulangi masalah buta aksara harus dilakukan melalui pendekatan dan pemberian kegiatan belajar mengajar secara continue atau terus-menerus yang tidak hanya dilakukan satu atau beberapa kali pertemuan saja. Selain itu, baik dari kami maupun beberapa pihak yang telah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan berkomitmen dalam melakukan gerakan pengentasan buta aksara yang merupakan program dari pusat untuk dilaksanakan guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan membangun kualitas manusia yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.”

Selanjutnya, menurut penuturan dari Bapak Andri Firdaus, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal menegaskan tentang kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

“Dapat saya jelaskan mas, bahwa kekuatan kami selaku pelaksana dalam program pengentasan masalah buta aksara yaitu dari adanya peraturan dari pusat yang baik berupa peraturan dari Menteri Pendidikan maupun Undang-Undang tentang pendidikan nasional. Hal lain yang menjadi keunggulan dari internal kami adalah dari SDM yang berkompeten dibidang PNFI sehingga dapat menjalin kerjasama yang baik antar anggota dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ditambah lagi kami memiliki program unggulan dalam penuntasan buta aksara yang berbasis desa dan lebih mendekatkan diri kepada setiap masyarakat, program tersebut kami beri nama IQRO (Iliteracy Quick Respons).”

Melalui hasil wawancara diatas, dapat diketahui kekuatan internal yang dimiliki dari Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut ini :

(a) SDM yang berkompeten pada bidangnya

Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes telah memiliki SDM yang potensial pada bidangnya yang diperoleh melalui diklat-diklat struktural pada berbagai tingkatan dalam menunjang ilmu maupun kinerja agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Sehingga dapat tercipta SDM yang berkompeten untuk memberikan pelayanan terbaik serta bisa menyampaikan sosialisasi dengan baik dan memberikan motivasi kepada masyarakat yang mengalami masalah buta aksara tentang pentingnya arti pendidikan.

(b) Dukungan dari Pemerintah berupa peraturan perundang-undangan

Dengan adanya dukungan dari pemerintah yang berupa peraturan perundang-undangan, maka Dinas Pendidikan

Kabupaten Brebes dapat berpatokan kepada pagu indikatif tersebut agar terciptanya masyarakat yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Berikut merupakan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan di Indonesia, antara lain sebagai berikut :

1. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003** tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005** tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008** tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008** tentang Pendanaan Pendidikan.
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010** tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006** tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007** tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal.
8. **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012** tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal.

9. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013** tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

10. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2014** tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keakasaraan Dasar

(c) Kerjasama yang baik antar anggota di Bidang PNFI

Dalam hal ini, kerjasama yang baik terlihat dari anggota di Bidang PNFI yang saling berkesinambungan antar satu seksi ke seksi yang lain dalam setiap program yang dijalankan dan saling membantu setiap adanya masalah atau hambatan yang timbul dalam pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

(d) Adanya program-program unggulan

Dari berbagai program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dalam menanggulangi masalah buta aksara, terdapat program IQRO (*Iliteracy Quick Respons*) yang merupakan program unggulan berbasis desa yang telah bekerjasama dengan organisasi tingkat desa dan telah bersinergi dengan TNI yang juga memiliki tujuan untuk membangun masyarakat desa agar dapat membaca, menulis

dan berhitung serta dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) di Kabupaten Brebes.

(2) *Weakness* (Kelemahan)

Adapun beberapa kelemahan yang dimiliki oleh para pegawai yang menjadi faktor penghambat dalam menjalankan suatu kebijakan. Hal tersebut dijabarkan langsung melalui wawancara dengan Bapak Andri Firdaus, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal yaitu sebagai berikut :

“Kami memang belum sempurna mas, tapi kami selalu mengusahakan yang terbaik dalam memberikan pelayanan. Masih banyak juga kelemahan yang kita miliki seperti keterbatasan SDM yang belum cukup memadai untuk melaksanakan sosialisasi dan program-program dalam menanggulangi masalah buta aksara di wilayah Kabupaten Brebes. Selain itu, yang menjadi sedikit hambatan dari kinerja kami adalah kurangnya anggaran untuk melaksanakan berbagai program penanggulangan buta aksara serta untuk pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sehingga dalam proses pembelajaran dan penyampaian ilmu kepada masyarakat menjadi kurang maksimal.”

Melalui pernyataan tersebut, dapat disederhanakan menjadi beberapa point-point berikut ini :

- (a) Kualitas sumberdaya manusia yang terbatas dan belum memadai

Kurangnya kualitas sumberdaya manusia disini dapat dilihat dari jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes yang terdiri dari 21 pejabat struktural dan staff berjumlah 63 orang. Sedangkan jumlah pendidik PKBM di Kabupaten Brebes

berjumlah 330 orang. Hal tersebut belum sebanding untuk menangani seluruh masyarakat Kabupaten Brebes yang mengalami buta aksara sebanyak 41.179 orang. Selain itu masih terdapat pendidik PKBM yang belum cukup ahli dalam menguasai bidang kerja dan tugasnya masing-masing. Seperti contohnya dalam menggunakan teknologi yang tersedia untuk menyampaikan materi-materi kepada para penyandang buta aksara. Padahal penggunaan teknologi tersebut sangat dibutuhkan sebagai media dalam pembelajaran kepada masyarakat. Sehingga hal ini menyebabkan keterlambatan penyampaian materi atau ilmu yang akan disalurkan kepada masyarakat.

- (b) Kurangnya sosialisasi mengenai kegiatan ataupun program-program tentang PKBM.

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara lengkap mengenai program ataupun kegiatan yang ada di PKBM sekitar mereka. Hal ini dikarenakan kurangnya waktu dan aparatur dari dinas yang terlibat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang program-program pemberantas buta aksara melalui PKBM yang ada di daerah-daerah.

- (c) Kurangnya sarana dan prasarana dalam proses belajar masyarakat

Masih banyak dijumpai pada PKBM di daerah Kabupaten Brebes yang minim akan sarana dan prasarana dalam

menunjang proses pembelajaran. Terdapat juga beberapa fasilitas yang merupakan sumbangan sukarela dari masyarakat yang mengikuti program-program atau kegiatan di PKBM tersebut dan ada pula yang berasal dari tenaga pengajar itu sendiri. Menurut Rancangan Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes 2012-2017, pada tahun 2012 tercatat memiliki gedung sekolah pada tingkat SD sebanyak 889 unit dengan jumlah total ruang kelas yang ada sebanyak 5525 ruang, dengan kondisi ruang kelas yang baik berjumlah 3203 ruang atau 57,97 %, rusak ringan 1630 ruang atau 29,50% dan rusak berat sebanyak 692 ruang atau 12,53%. Pada tingkat SMP terdapat sebanyak 128 unit sekolah dengan jumlah ruang kelas yang ada sebanyak 1626 ruang, dengan kondisi baik berjumlah 1262 ruang atau 77,62%, rusak ringan 256 ruang atau 15,74%, dan rusak berat sebanyak 108 ruang atau 6,64%. Pada tingkat SMA terdapat sebanyak 32 unit sekolah dan SMK sebanyak 58 unit sekolah dengan jumlah ruang kelas yang ada sebanyak 1112 ruang, dengan kondisi baik berjumlah 985 ruang atau 88,58%, rusak ringan 89 atau 8,00%, dan rusak berat sebanyak 38 ruang atau 3,42%.

(d) Kurangnya tenaga pengajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Jumlah tenaga pengajar masih belum cukup untuk menutupi kebutuhan di setiap PKBM, yaitu terdapat 330 orang untuk

menangani seluruh masyarakat Kabupaten Brebes yang mengalami buta aksara pada tahun 2015 sebanyak 41.179 orang . Faktor tersebut juga dapat menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan menyebabkan materi-materi yang disampaikan belum dapat diterima dengan secara sempurna. Maka dibutuhkan tenaga pengajar yang berkompeten untuk berkontribusi di PKBM dalam membuat masyarakat menjadi melek aksara dan tentunya menjadi masyarakat yang lebih berkualitas.

3.1.2.2 Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman organisasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.

1) Opportunities (Peluang)

Dalam sebuah organisasi harus memiliki kemampuan untuk memanfaatkan peluang dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada dengan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes memiliki beberapa peluang dalam melaksanakan strategi untuk menanggulangi buta aksara. Peluang-peluang tersebut telah dibaca dengan baik dan dimanfaatkan guna menutupi kelemahan yang ada untuk memaksimalkan potensi-potensi yang berasal dari faktor eksternal. Beberapa peluang tersebut dapat terlihat berdasarkan petikan wawancara yang

disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, yaitu Bapak Andri Firdaus, S.Pd., M.Pd sebagai berikut :

“Yang jelas masalah buta aksara itu sebetulnya tidak melulu urusan tentang Dinas Pendidikan ya mas. Karena kalau diserahkan kepada Dinas Pendidikan semua saya kira akan menjadi sangat berat. Maka jalur komunikasi yang dibangun memang sangat-sangat perlu dilakukan. Disamping itu, kami juga telah melihat peluang yang ada disekitar untuk bisa bekerjasama dalam menanggulangi masalah buta aksara. Oleh karena itu kami dengan berbagai macam mitra telah menjalin kerjasama, diantaranya adalah Pemerintah Desa, Badan Pemberdayaan Desa, Bappeda, BPS, dan unsur lain seperti TNI. Terkadang kami juga mendapat bantuan dari mahasiswa-mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN dari berbagai kampus di Jawa Tengah dan Jawa Barat.”

Melalui pernyataan dalam wawancara tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa bagian, antara lain :

(a) Bekerjasama dengan aparatur desa

Kerjasama yang dilakukan dengan aparatur desa dalam bentuk sosialisasi mengenai keberadaan PKBM yang ada disekitar masyarakat. Tujuannya tidak lain untuk merangkul dan memberikan perhatian khusus kepada penyandang buta aksara agar dengan cepat dapat melek aksara melalui kegiatan pembelajaran keaksaraan dasar yang ada di PKBM.

(b) Membangun komunikasi yang baik kepada berbagai pihak

Jalur komunikasi yang telah dibangun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dalam menaggulangi masalah buta aksara sudah cukup bagus, hal ini telah dibuktikan dengan banyaknya

pihak yang telah bekerjasama dengan baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami buta aksara.

(c) Bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan KODIM 0713 di Kabupaten Brebes

Dengan terjalinnya hubungan antara Dinas Pendidikan dengan PKBM maka telah sangat membantu usaha pemerintah dalam membuat masyarakat melek aksara dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan manusia yang lebih baik. Selain itu, masalah buta aksara juga mulai teratasi dengan kerjasama TNI yang tidak lain juga memiliki program yang sama dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Melalui program IQRO yang berbasis kemandirian desa, maka peran PKBM dan TNI sangat membantu dalam meningkatkan kualitas masyarakat melalui program pendidikan keaksaraan dasar berupa pelatihan membaca, menulis, dan berhitung.

(d) Bekerjasama dengan mahasiswa pada program Kuliah Kerja Nyata

Hampir setiap tahun Dinas Pendidikan mendapatkan bantuan tenaga pengajar di PKBM yang berasal dari mahasiswa berbagai macam universitas yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Brebes. Hal ini tentu sangat membantu kerja tenaga pengajar dalam memberikan materi-materi kepada para penyandang buta aksara. Disamping

itu, mahasiswa juga terkadang membantu memberikan kelengkapan fasilitas guna memaksimalkan kinerja tenaga pengajar dalam menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat.

2) *Threats (Ancaman)*

Disetiap organisasi publik pasti terdapat kendala atau masalah yang dapat menghambat strategi yang akan dilaksanakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukannya kemampuan untuk mengidentifikasi kendala yang ada sehingga organisasi mampu untuk mengantisipasi setiap masalah yang akan datang dan memberikan solusi kepada setiap masalah. Dalam melaksanakan strategi pemberantasan buta aksara, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes juga dihadapkan kepada beberapa ancaman-ancaman yang ada. Hal ini disampaikan oleh Bapak Andri Firdaus, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal adalah sebagai berikut :

“Berdasarkan pengalaman kami dari tahun-tahun sebelumnya yang menjadi kendala dalam melaksanakan program pemberantasan buta aksara adalah tidak adanya komitmen yang kuat dari masyarakat. Hal inilah yang menjadi faktor penghambat dalam menaikkan angka melek aksara di Kabupaten Brebes. Tidak heran juga bila ada masyarakat yang sudah bisa membaca, menulis dan berhitung kemudian menjadi buta aksara kembali. Memang kita tidak dapat menyalahkan masyarakat sepenuhnya atas masalah ini, melainkan kami sebagai organisasi publik yang berhubungan langsung dengan mereka terus berusaha untuk mengatasi ancaman-ancaman yang berasal dari luar dengan tetap memberikan sosialisasi dan motivasi mengenai pentingnya arti pendidikan.”

Menurut hasil wawancara tersebut, berikut merupakan penjabaran mengenai ancaman yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, antara lain sebagai berikut :

- (a) Kurangnya komitmen dan motivasi tentang pendidikan yang dimiliki masyarakat

Masyarakat kurang memiliki komitmen kuat dan motivasi dari diri masyarakat itu sendiri untuk mengikuti proses pembelajaran keakasaran dasar yang dapat diprediksikan akan kembali menjadi buta aksara kembali. Hal ini yang menjadi ancaman besar bagi Dinas Pendidikan Brebes dalam meningkatkan angka melek aksara. Masalah ini bukan hanya merugikan Dinas Pendidikan sebagai pemangku kebijakan, melainkan juga merugikan bagi masyarakat itu sendiri yang akan tetap terjerat oleh masalah buta aksara dan dapat berdampak pada kehidupan sehari-harinya.

- (b) Sebagian masyarakat memiliki latar belakang pendidikan yang rendah

Keterjangkauan masyarakat Kabupaten Brebes terhadap pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata dari provinsi dan nasional. Selain itu, angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar masih relatif tinggi, yaitu 0,48% untuk SD/MI, dan 0.82%

untuk SMP/MTs pada tahun 2014. Sedangkan angka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi masih relatif rendah, baik untuk melanjutkan ke jenjang SMP maupun ke jenjang SMA.

(c) Kurang terjangkaunya tempat Pusat Kegiatan Belajar dan Mengajar

Akses yang dituju masyarakat untuk dapat sampai ke tempat PKBM masih dirasa cukup jauh. Hal ini dikarenakan belum tersedianya PKBM pada setiap kecamatan di Kabupaten Brebes. Sehingga masyarakat yang berbeda desa atau kecamatan harus menepuh perjalanan yang cukup jauh agar dapat menuntut ilmu di PKBM.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal diatas, diharapkan sebuah organisasi akan mendapat informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang bisa dianalisis menjadi sebuah strategi yang bermanfaat bagi kelangsungan dan kemakmuran organisasi tersebut.

Melalui beberapa wawancara yang telah dilakukan, maka diperoleh data mengenai faktor internal dan eksternal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes yang dapat mempengaruhi setiap pengambilan strategi. Berikut merupakan susunan dari faktor-faktor tersebut melalui tabel lingkungan strategi, yaitu :

Tabel 3 .1.
Faktor Internal Dan Eksternal

STRENGTH (KEKUATAN)	WEAKNESS (KELEMAHAN)
<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang berkompeten pada bidangnya 2. Dukungan dari pemerintah berupa peraturan perundang-undangan 3. Kerjasama yang baik antar anggota di Bidang PNFI 4. Adanya program-program unggulan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas SDM yang terbatas dan belum memadai 2. Kurangnya sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat 3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam proses belajar masyarakat 4. Kurangnya tenaga pengajar di PKBM
OPPORTUNITY (PELUANG)	THREAT (ANCAMAN)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dengan aparat desa 2. Membangun komunikasi yang baik kepada semua pihak 3. Bekerjasama dengan PKBM dan KODIM 0713 di Kabupaten Brebes 4. Bekerjasama dengan mahasiswa pada program KKN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya komitmen motivasi yang dimiliki masyarakat 2. Sebagian masyarakat memiliki latarbelakang pendidikan yang rendah 3. Kurang terjangkaunya tempat PKBM bagi masyarakat

Dalam menganalisis sebuah lingkungan strategis dapat dilakukan melalui matriks SWOT dan melalui penjabaran isu strategi berdasarkan hasil temuan dari keseluruhan hasil analisis yang telah dilakukan. Kemudian dari hasil analisis tersebut dapat disusun untuk menjadi isu-isu yang ditemukan, serta rangkuman atas strategi yang dapat diambil berdasarkan analisis SWOT tersebut. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta yang ada dan berdasarkan asumsi yang dibangun dari kerangka berfikir manajemen strategi, maka diperoleh strategi-strategi yang tepat untuk digunakan dalam upaya menanggulangi masalah buta aksara di Kabupaten Brebes.

Manfaat lain dari matriks SWOT adalah dapat menggambarkan bagaimana manajemen strategis yang tepat bagi suatu organisasi dengan meakukan tindakan mencocokkan peluang dan ancaman dari faktor eksternal dengan kekuatan dan

kelemahan yang berasal dari faktor internal. Sehingga akan menghasilkan empat strategi sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Model Analisis Matriks SWOT Menurut Kern (1992)

Faktor Eksternal / Faktor Internal	<i>Opportunities</i> (O)	<i>Threats</i> (T)
<i>Strengths</i> (S)	<i>Comparative Advantage</i>	<i>Mobilization</i>
<i>Weakness</i> (W)	<i>Investment Divestment</i>	<i>Damage Control</i>

Sumber: Pengambilan Keputusan Strategik

Strategi S.O : Strategi ini digunakan untuk menarik keuntungan yang didapat dari berbagai peluang yang tersedia, sehingga dapat memanfaatkan kekuatan dalam mengejar peluang tersebut.

Strategi S.T : Strategi ini dipakai untuk memperkecil dampak dari ancaman yang berasal dari faktor eksternal.

Strategi W.O : Strategi ini memiliki tujuan untuk memperbaiki kelemahan yang berasal dari faktor internal dan memanfaatkan peluang yang bersumber dari faktor eksternal.

Strategi W.T : Strategi ini mempunyai tujuan untuk mengurangi kelemahan yang berasal dari faktor internal dan dapat menghindari ancaman yang bersumber dari faktor eksternal.

Tabel 3.3.
Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dalam Menanggulangi Buta Aksara di Kabupaten Brebes Berdasarkan Analisis SWOT

Faktor Eksternal Faktor Internal	PELUANG (O)	ANCAMAN (T)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dengan aparatur desa 2. Membangun komunikasi yang baik kepada semua pihak 3. Bekerjasama dengan PKBM dan KODIM 0713 di Kabupaten Brebes 4. Bekerjasama dengan mahasiswa pada program KKN
KEKUATAN (S)	S.O	S.T
<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM berkompeten pada bidangnya 2. Dukungan dari pemerintah berupa peraturan perundang-undangan 3. Kerjasama yang baik antar anggota di Bidang PNFI 4. Adanya program-program unggulan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas kerja aparatur Dinas Pendidikan 2. Melaksanakan program berdasarkan peraturan dan undang-undang 3. Memaksimalkan kerjasama dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendekatan secara <i>continue</i> 2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya arti pendidikan 3. Memotivasi masyarakat untuk mengerti manfaat besar dari pendidikan
KELEMAHAN (W)	W.O	W.T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas SDM yang terbatas dan belum memadai 2. Kurangnya sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat 3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam proses belajar masyarakat 4. Kurangnya tenaga pengajar di PKBM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan jumlah SDM melalui diklat dan bimtek 2. Mengefektifkan SDM dalam melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat 3. Memaksimalkan sarana dan prasarana dalam proses belajar masyarakat 4. Bekerjasama dengan mahasiswa dalam memberikan materi pembelajaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelatihan dan praktek dalam pembelajaran 2. Melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat 3. Mengoptimalkan fasilitas yang ada untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat 4. Memaksimalkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk bisa menjangkau masyarakat

Berdasarkan tabel analisis strategi dengan menggunakan metode SWOT diatas, dapat diketahui beberapa strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dalam menanggulangi masalah buta aksara adalah sebagai berikut :

Strategi S.O merupakan hasil dari analisis kekuatan internal dan peluang dari eksternal organisasi yaitu dengan menerapkan strategi meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam melaksanakan tugas-tugasnya, melaksanakan program kerja berdasarkan peraturan yang telah ada, memaksimalkan kerjasama dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran kepada masyarakat, dan mengoptimalkan kontribusi mahasiswa dalam program penanggulangan buta aksara. Adanya beberapa strategi tersebut dimaksudkan untuk memanfaatkan kekuatan yang berasal dari internal organisasi guna mengejar peluang yang ada.

Strategi S.T merupakan hasil dari analisis kekuatan internal dan ancaman dari eksternal organisasi yaitu dengan strategi melakukan pendekatan kepada masyarakat secara *countiue* atau terus-menerus, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan, memberikan motivasi kepada masyarakat agar mengerti dari manfaat besarnya pendidikan, dan melakukan *moving class* atau berpindah tempat belajar untuk bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Strategi tersebut berfungsi untuk memperkecil dampak ancaman yang berasal dari faktor eksternal.

Strategi W.O merupakan hasil dari analisis kelemahan internal dan peluang dari eksternal organisasi yaitu dapat merumuskan staretegi dengan mengoptimalkan jumlah sumberdaya manusia dan melakukan diklat atau pelatihan, mengefektifkan sumberdaya manusia yang terkait program tersebut dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menambahkan sarana dan prasarana dalam proses belajar di masyarakat, dan bekerjasama dengan mahasiswa dalam memberikan materi pembelajaran kepada masyarakat di PKBM.

Beberapa strategi tersebut memiliki fungsi untuk memperbaiki kelemahan yang berasal dari faktor internal dan memanfaatkan peluang dari faktor eksternal.

Strategi W.T merupakan hasil dari analisis kelemahan internal dan ancaman dari eksternal organisasi yaitu dengan merumuskan strategi memberikan *softskill* dan memberikan praktek dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung, melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat, mengoptimalkan fasilitas yang ada untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat, dan memaksimalkan kerjasama dengan mitra yang sudah terjalin untuk bisa menjangkau masyarakat yang mengikuti program di PKBM. Melalui strategi tersebut dapat digunakan untuk mengurangi kelemahan internal dan dapat menghindari ancaman yang berasal dari faktor eksternal.

3.1.3 Identifikasi Isu Strategis

Isu-isu strategis secara mendasar dapat timbul melalui putusan organisasi yang dibuat berdasarkan lingkungan internal dan lingkungan dari organisasi tersebut. Menganalisis isu-isu strategis merupakan langkah lanjutan dari analisis SWOT dalam mengidentifikasi kebijakan pokok yang dihadapi oleh organisasi. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes melakukan berbagai upaya untuk menganalisis isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat.

Adapun beberapa isu-isu strategis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan keterjangkauan pendidikan melalui penyediaan bantuan operasional pendidikan, pemberian bantuan pendidikan bagi anak dan keluarga miskin dan penerapan efisiensi penyelenggaraan

pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan yang bekerjasama dengan komite sekolah maupun pihak swasta.

- (2) Meningkatkan pemerataan pendidikan melalui perbaikan ruang kelas rusak dan penambahan kelas baru, serta pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Meningkatkan kualitas dan keterjaminan pendidikan melalui pemberian kesempatan studi lanjut atau mengikuti pendidikan dan latihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta penerapan standar kompetensi lulusan.
- (4) Membuka akses pendidikan bagi yang karena satu dan lain hal tidak dapat menempuh jenjang pendidikan formal, melalui Pendidikan Kesetaraan Paket A, Kesetaraan Paket B dan Kesetaraan Paket C.
- (5) Meningkatkan angka melek huruf sekaligus mengurangi angka buta aksara, serta meningkatkan kecapan hidup dengan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kecakapan hidup/life skill.
- (6) Meningkatkan prestasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan melalui pembinaan olahraga dan peningkatan kecapakan hidup dan kewirausahaan pemuda bekerjasama dengan swasta.
- (7) Meningkatkan peran guru dan pemuka agama dalam rangka pengembangan budaya religiusitas di sekolah dan di lingkungan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Brebes dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes sebagai aparaturnya yang secara langsung menangani masalah buta aksara dituntut untuk menekan dan mengurangi jumlah penyandang buta

aksara. Hal ini dikarenakan masih adanya penyandang buta aksara di Kabupaten Brebes dan merupakan dengan jumlah terbanyak di daerah Jawa Tengah meskipun jumlahnya dari tahunnya ke tahun semakin menurun. Oleh karena itu Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes diharapkan mempunyai strategi-strategi yang mampu menangani permasalahan tentang buta aksara, sehingga masyarakat menjadi melek baca dan dapat meningkatkan taraf hidupnya.

3.2 Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dalam Menanggulangi Buta Aksara di Kabupaten Brebes

Tahap selanjutnya setelah melakukan analisis SWOT, maka dapat diketahui strategi-strategi apa saja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dalam menanggulangi masalah buta aksara pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

(1) Meningkatkan kualitas dan keterjaminan pelayanan pendidikan

Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan pendidikan telah menjadi agenda yang sangat penting pada seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Hal ini tidak hanya untuk memenuhi harapan undang-undang, namun juga terkait erat pada penjaminan posisi bangsa dalam persaingan dengan negara-negara lain di masa depan. Salah satu penentunya adalah pendidikan yang lebih bermutu. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dalam meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan pendidikan memiliki beberapa aspek, antara lain:

(a) Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan

Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Menyadari akan pentingnya proses peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes selalu berupaya untuk mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan sumberdaya manusia. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT), bimbingan teknis (BIMTEK), dan latihan dasar kepemimpinan (LDK). Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja organisasi secara umum dan para aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes pada khususnya dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dr. Tahroni, M.Pd sebagai berikut :

“Demi meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan pendidikan untuk masyarakat, kami mulai perbaikan dari diri kami sendiri dan sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes melalui berbagai kegiatan seperti DIKLAT, BIMTEK, dan LDK. Hal ini kami lakukan guna memberikan pelayanan yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya.”

(b) Meningkatkan kompetensi lulusan pendidikan non formal

Pendidikan non formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Melalui hal tersebut, selanjutnya Dinas Pendidikan Brebes berupaya dalam meningkatkan kompetensi lulusan pendidikan non formal melalui program pendidikan keaksaraan usaha mandiri. Pendidikan keaksaraan usaha mandiri adalah kegiatan peningkatan kemampuan keberaksaraan melalui pembelajaran dan keterampilan usaha yang dapat meningkatkan produktivitas perorangan maupun kelompok secara mandiri bagi peserta didik yang telah mengikuti ataupun mencapai kompetensi keaksaraan dasar dengan menunjukkan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA). Adapun beberapa kegiatan dalam pendidikan usaha mandiri yang telah dilakukan seperti membuat olahan jajanan pasar, kerajinan tangan dari olahan sampah plastik, dan belajar di bidang usaha konveksi.

Aspek tersebut diungkapkan oleh Bapak Mardani S.Ag selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Budi Utomo sekaligus Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat se-Kabupaten Brebes dalam hasil wawancara berikut ini :

“Tahapan selanjutnya setelah peserta didik menempuh program pendidikan keaksaraan dasar, maka mereka akan diberikan kemampuan ataupun keterampilan dalam program pendidikan keaksaraan usaha mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha mengembangkan dan mewujudkan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik, serta agar peserta didik terhindar dari ancaman buta aksara kembali.”

(2) Meningkatkan kerjasama dalam sosialisasi buta aksara dengan organisasi yang terkait

Berkaitan dengan kerjasama dalam bentuk sosialisasi mengenai buta aksara, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes melalui program keaksaraan dan kesetaraan bekerjasama dengan beberapa pihak terkait. Hal ini dilakukan guna menunjang efektivitas dan efisiensi dalam menanggulangi masalah buta aksara di Kabupaten Brebes. Berikut merupakan beberapa pihak yang terlibat kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, yaitu antara lain :

(a) Perangkat Daerah

Dalam memberikan sosialisasi tentang pentingnya menanggulangi buta aksara, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes bekerjasama dengan beberapa pihak yang memegang peran penting di masyarakat yang terdiri dari Perangkat Daerah seperti Camat,

Kepala Desa, Ketua RT, dan Ketua RW, Organisasi Kepemudaan seperti Karang Taruna dan KNPI, serta organisasi masyarakat dibidang keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdathul Ulama. Hal ini dikarenakan perangkat daerah merupakan pihak yang sangat erat hubungannya ataupun yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga akan sangat efektif apabila Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes bekerjasama dengan perangkat daerah dalam menurunkan tingkat buta aksara di Kabupaten Brebes.

(b) Mahasiswa

Peran mahasiswa dalam menaggulangi masalah buta aksara sangat membantu untuk meningkatkan angka melek aksara di Kabupaten Brebes yang masih rendah diantara beberapa daerah lain di Provinsi Jawa Tengah. Setiap tahunnya Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes mendapatkan bantuan dari mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas di Jawa Tengah maupun dari Jawa Barat. Mahasiswa-mahasiswa tersebut terjun langsung ke masyarakat dalam proses pembelajaran kepada penyandang buta aksara di setiap PKBM yang ada di Kabupaten Brebes. Kegiatan tersebut terangkum dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh mahasiswa di bidang pendidikan selama satu bulan hingga dua bulan lamanya.

(c) Militer

Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes bekerjasama dengan pihak TNI dari KODIM 0713/Brebes yang memiliki program sejalan dalam menanggulangi buta aksara di Kabupaten Brebes. Kegiatan yang memiliki tema “Pengentasan Buta Akasara Kerjasama KODAM IV/DIPONEGORO dengan Pemerintah Daerah Guna Mendukung Percepatan Peningkatan SDM di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta”, memberikan pembelajaran dan keterampilan kepada masyarakat khususnya di pemukiman pedesaan yang padat penduduknya. Diharapkan kegiatan tersebut dapat meningkatkan sumber daya manusia terutama masyarakat yang buta aksara dengan tujuan untuk mengurangi jumlah angka bagi masyarakat yang mengalami buta aksara khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan.

Hal tersebut tergambar melalui hasil wawancara langsung dengan Bapak Andri Firdaus, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Bagian Keaksaraan dan Kesetaraan Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes sebagai berikut :

“Selama ini kami telah terbantu sekali mas, berkat adanya kerjasama untuk memberikan sosialisasi dan menanggulangi masalah buta aksara dengan beberapa pihak yang berperan penting dalam masyarakat seperti Camat, Kepala Desa, Ketua RT, Ketua RW, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan. Selain itu, kami juga telah bekerjasama dengan TNI dari KODIM 0713/Brebes dan tidak menutup kemungkinan pula jika kami mendapat bantuan dari mahasiswa yang melaksanakan program KKN di wilayah Kabupaten Brebes.”

(3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan informal dan nonformal

Menurut wawancara yang dilakukan langsung kepada Bapak Andri Firdaus, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mengenai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan informal dan non formal adalah sebagai berikut :

“Berbagai upaya telah kami lakukan untuk menanggulangi masalah buta aksara, salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan informal dan nonformal. Hal ini kami lakukan agar masyarakat dapat dengan mudah untuk memperoleh pendidikan yang diinginkan meskipun melalui jalur pendidikan non formal. Dimana didalamnya terdapat beberapa program yang tentunya dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat menanggulangi masalah buta aksara seperti program kejar paket, pendidikan keaksaraan dasar, dan program IQRO.”

Melalui hasil wawancara tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan informal dan non formal bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan pengembangan pendidikan nonformal yang bermutu dan terjangkau melalui pendidikan non formal kesetaraan sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat, dan pendidikan nonformal kesetaraan SMP, atau bentuk lain yang sederajat. Sehingga anak yang berusia 7-15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak yang memerlukan perhatian khusus dalam memperoleh pendidikan, dapat memperoleh pendidikan setidaknya sampai sekolah menengah pertama atau sederajat. Adapun beberapa aspek yang mempengaruhinya, antara lain sebagai berikut :

(a) Pemerataan dan perluasan akses

1. Penguatan satuan-satuan pendidikan non formal meliputi lembaga kursus, kelompok belajar, PKBM dan yang sejenis.
2. Penyediaan berbagai alternatif pelayanan pendidikan menengah melalui jalur non formal.
3. Memberdayakan dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan non formal.
4. Pengentasan buta aksara

(b) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka mencapai pemerataan, akses pendidikan, mutu pendidikan, relevansi dan daya saing pendidikan di Kabupaten Brebes. Program tersebut antara lain seperti perbaikan ruang kelas baik yang rusak ringan maupun yang rusak berat, serta pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB).

(c) Peningkatan program-program dalam menanggulangi buta aksara

Adapun beberapa program dari Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dalam menanggulangi masalah buta aksara adalah sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan Program Kesetaraan

a) Program Paket A Setara SD

Program Pendidikan Kesetaraan Paket A merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi anak yang disebabkan oleh karena berbagai faktor sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SD/MI, yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sehingga pada nantinya lulusan tersebut diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SD/MI.

b) Program Paket B Setara SMP

Program Pendidikan Kesetaraan Paket B merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi anak yang disebabkan oleh karena berbagai faktor sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SMP/MTs (putus sekolah di SMP/MTs atau putus lanjut SD), yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sehingga pada nantinya lulusan tersebut diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SMP/MTs.

c) Program Paket C Setara SMA

Program Pendidikan Kesetaraan Paket C merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi anak yang disebabkan oleh karena berbagai faktor sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SMA/MA, yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sehingga pada nantinya lulusan tersebut diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SMA/MA.

2) Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

Pendidikan keaksaraan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara dalam bidang pendidikan, sekaligus sebagai upaya untuk pemenuhan hak-hak asasi manusia. Pendidikan keaksaraan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas warga masyarakat dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Dalam hal ini, pendidikan keaksaraan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas peserta didik hingga mencapai kemampuan *basic literacy*.

Pendidikan keaksaraan dengan melalui pendekatan keaksaraan fungsional diharapkan dapat memberikan keterampilan praktis yang diarahkan pada peningkatan kualitas masyarakat di

bidang ekonomi, terutama dalam rangka mendapatkan nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

3) Program IQRO (*Illiteracy Quick Respon*)

Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes memiliki inovasi terbaru untuk menanggulangi masalah mengenai buta aksara di Kabupaten Brebes, yaitu melalui program yang bernama IQRO (*Illiteracy Quick Respon*). Program tersebut merupakan sebuah upaya percepatan pembebasan buta aksara yang berbasis desa dengan membentuk Sekretariat IQRO di tiap-tiap desa dengan memberikan kemampuan keaksaraan dasar keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Manfaat dari program IQRO bagi masyarakat diantaranya adalah memberikan kemudahan akses masyarakat yang ingin terbebaskan dari buta aksara, hal ini dikarenakan Sekretariat IQRO berada di balai desa atau kelurahan. Melalui program tersebut, warga masyarakat dapat meningkatkan derajat pengetahuannya dan meningkatkan rasa empati terhadap sesama bagi penyandang buta aksara.